

Pelibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement*)

| *Every Voice Mapped, Every Relationship Managed*

1 MENGENAL PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Membangun dialog terstruktur dari hulu hingga hilir

Apa Itu Pelibatan Pemangku Kepentingan?

Pelibatan pemangku kepentingan atau stakeholder engagement adalah rangkaian proses terstruktur yang menghubungkan perusahaan dengan seluruh pihak berkepentingan atau terdampak oleh kegiatan operasionalnya. Rangkaian tersebut dijalankan mulai dari hulu perencanaan hingga hilir evaluasi program, dengan panduan utama AA1000 *Stakeholder Engagement Standard* (AA1000SES) yang diterbitkan oleh AccountAbility.

Banyak perusahaan masih menjalankan komunikasi dengan masyarakat sekitar secara sporadis dan reaktif. Pola tersebut membuat perusahaan hanya hadir saat terjadi keluhan, tuntutan, ataupun kejadian mendesak. Pelibatan pemangku kepentingan mengubah pola tersebut menjadi dialog yang terjadwal, terdokumentasi, dan memiliki mekanisme umpan balik yang jelas. Dari sudut pandang bisnis, dialog terstruktur menurunkan risiko konflik sosial, mempercepat penyelesaian keluhan, sekaligus memperkuat izin sosial untuk beroperasi atau *social license to operate*.

Kedudukan terhadap Pemetaan Sosial

Pemetaan sosial menghasilkan potret kondisi masyarakat sekaligus daftar pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional. Pelibatan pemangku kepentingan meneruskan hasil pemetaan sosial dengan membuka dialog berkelanjutan antara perusahaan dan setiap pihak yang telah teridentifikasi, mulai dari tokoh masyarakat, aparat pemerintah, hingga kelompok terdampak. Perusahaan yang menjalankan keduanya memiliki dasar perencanaan dan mekanisme pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang saling terhubung.

TITIK AWAL

Pemetaan Sosial

Potret kondisi masyarakat serta daftar pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional.

KELANJUTAN

Pelibatan Pemangku Kepentingan

Dialog berkelanjutan dengan setiap pihak yang telah teridentifikasi dari pemetaan sosial.



Hasil dari Kajian

Laporan pelibatan pemangku kepentingan menghasilkan 4 produk utama, yaitu:

- 1 **Peta pemangku kepentingan** lengkap dengan tingkat pengaruh dan kepentingan setiap aktor.
- 2 **Potret tingkat keterlibatan** berdasarkan 5 tingkatan AA1000SES.
- 3 **Rekomendasi strategi pembinaan hubungan** yang disesuaikan untuk setiap kelompok pemangku kepentingan.
- 4 **Hasil pengukuran izin sosial untuk beroperasi** dengan pendekatan *Social License to Operate Index* (SLI).

2

DASAR REGULASI DAN STANDAR ACUAN

Prinsip dasar dan tingkatan pelibatan menurut AA1000SES

Kewajiban perusahaan untuk melibatkan pemangku kepentingannya bersumber dari beberapa lapis aturan nasional serta sejumlah panduan internasional. Tabel berikut memperjelas kedudukan setiap rujukan dan perannya secara langsung terhadap penyusunan kajian pelibatan pemangku kepentingan.



REGULASI NASIONAL

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Menjadi dasar hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi perseroan yang menjalankan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Pemenuhan kewajiban ini menempatkan pelibatan pemangku kepentingan sebagai cara perusahaan untuk membangun hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Mewajibkan penyusunan rencana kerja TJSL secara terencana dan beranggaran yang menuntut adanya mekanisme dialog dengan pemangku kepentingan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)

Menempatkan pelibatan pemangku kepentingan sebagai salah satu aspek penilaian pemberdayaan masyarakat pada peringkat Hijau dan Emas.



STANDAR DAN PANDUAN INTERNASIONAL

AA1000 *Stakeholder Engagement Standard* (AA1000SES) 2015

Panduan operasional pelibatan pemangku kepentingan menetapkan 3 prinsip dasar dan 5 tingkatan pelibatan sebagai kerangka penyusunan strategi.

SNI ISO 26000:2010 tentang Panduan tanggung jawab sosial

Panduan Tanggung Jawab Sosial yang merupakan adopsi identik dari ISO 26000:2010. Standar ini merumuskan 7 subjek utama tanggung jawab sosial, salah satunya adalah pelibatan dan pengembangan masyarakat yang menjadi rujukan utama pemetaan sosial.

International Finance Corporation (IFC) Performance Standard 1

Panduan pelibatan komunitas terdampak dan mekanisme penanganan keluhan pada proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan internasional.

Global Reporting Initiative (GRI) 2: General Disclosures 2021 (butir 2-29)

Standar pengungkapan pendekatan pelibatan pemangku kepentingan dalam laporan keberlanjutan.



Rujukan Utama

Rujukan utama pelibatan pemangku kepentingan adalah *AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES)* yang diterbitkan oleh *AccountAbility*.

Standar ini menetapkan 3 prinsip dasar sebagai tolok ukur mutu dialog antara perusahaan dan pemangku kepentingannya, serta merumuskan 5 tingkatan pelibatan yang menggambarkan kedalaman hubungan yang dibangun.

3 Prinsip Dasar AA1000SES



Inklusivitas *Inclusivity*

Perusahaan menerima tanggung jawab untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka.



Materialitas *Materiality*

Perusahaan mengidentifikasi isu-isu yang benar-benar penting bagi perusahaan maupun pemangku kepentingannya.



Responsivitas *Responsiveness*

Perusahaan memberikan tanggapan yang tepat waktu dan proporsional terhadap isu material yang telah teridentifikasi.

5 Tingkatan Pelibatan

AA1000SES merumuskan 5 tingkatan yang menggambarkan kedalaman relasi antara perusahaan dan setiap kelompok pemangku kepentingannya. Tingkatan tersebut menjadi dasar penyusunan strategi pelibatan yang proporsional terhadap posisi setiap aktor dalam matriks pengaruh dan kepentingan.

1 Memantau (*Monitor*)

Perusahaan mengobservasi aktivitas dan keadaan pemangku kepentingan melalui pemberitaan, kanal digital, dan sumber sekunder lainnya tanpa interaksi langsung.

2 Memberi Informasi (*Inform*)

Perusahaan menyampaikan informasi satu arah kepada pemangku kepentingan melalui buletin, laporan, papan pengumuman, dan kanal resmi lainnya.

3 Berkonsultasi (*Consult*)

Perusahaan mengumpulkan masukan pemangku kepentingan melalui survei, wawancara, dan pertemuan konsultatif untuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

4 Melibatkan (*Involve*)

Perusahaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk memastikan aspirasi mereka tercermin pada rancangan program dan alternatif kebijakan.

5 Berkolaborasi (*Collaborate*)

Perusahaan dan pemangku kepentingan mengambil keputusan bersama, berbagi tanggung jawab pelaksanaan, serta bertanggung jawab atas hasil program secara bersama.



Penerapan Melalui Deklarasi Mandiri

AA1000SES dan SNI ISO 26000:2010 disusun sebagai panduan dan tidak dirancang untuk keperluan sertifikasi. Penerapannya dibuktikan melalui rekam jejak praktik, sehingga kekuatan klaim pelibatan pemangku kepentingan sebuah perusahaan bergantung pada mutu dokumentasinya. Kajian pelibatan pemangku kepentingan menjadi dokumentasi yang membuktikan bahwa dialog dirancang dan dijalankan secara terstruktur dan terukur.

3 URGENSI PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Setiap wilayah operasional memiliki jaringan warga, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan pelaku usaha yang kepentingannya bersinggungan dengan kegiatan perusahaan. Ketika kepentingan itu tidak terbaca dan tidak terkelola, gesekan kecil dapat tumbuh menjadi keluhan berulang, pemberitaan negatif, hingga terhambatnya kegiatan di lapangan. Pelibatan pemangku kepentingan menata risiko ini dengan membuka saluran dialog yang menjadikan harapan dan kekhawatiran warga sebagai bahan pengambilan keputusan perusahaan.

Nilai pelibatan pemangku kepentingan terasa pada 2 sisi sekaligus. Pada sisi keberlangsungan usaha, dialog yang sehat menjaga hubungan jangka panjang dan memperkuat legitimasi sosial perusahaan di mata masyarakat sekitar. Pada sisi kepatuhan, dokumentasi pelibatan yang tertata menjadi bukti kinerja yang diperhitungkan dalam penilaian PROPER.

Nilai bagi Keberlangsungan Usaha



Sistem peringatan dini konflik sosial

Dialog terjadwal memperlihatkan gejala ketegangan pada tahap awal, sehingga perusahaan memiliki waktu untuk merespons sebelum eskalasi.



Bahan pengungkapan laporan keberlanjutan

Rekam jejak pelibatan langsung memenuhi kebutuhan pengungkapan GRI 2-29 tentang pendekatan pelibatan pemangku kepentingan.



Penguatan izin sosial untuk beroperasi

Hubungan yang dibangun secara konsisten meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kegiatan operasional perusahaan.

Manfaat bagi Penilaian PROPER

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Nomor 7 Tahun 2025 mengatur terkait kriteria penilaian kinerja lingkungan perusahaan yang melampaui ketaatan (*beyond compliance*) atau peringkat Hijau dan Emas. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu bidang kinerja pada peringkat beyond compliance tersebut, dengan pelibatan pemangku kepentingan sebagai salah satu aspek penilaiannya.

Kedudukan dalam Aspek Penilaian

Kriteria pemberdayaan masyarakat terdiri atas 8 aspek penilaian, yaitu kebijakan pengembangan masyarakat, struktur dan tanggung jawab, alokasi dana, perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi, pelibatan pemangku kepentingan, serta publikasi dan penghargaan. Aspek pelibatan pemangku kepentingan berdiri sendiri sebagai butir ke-7 dan menilai keluasan serta mutu dialog perusahaan dengan pihak-pihak berkepentingan.

Kriteria Penilaian

Nilai

Memiliki dokumen *stakeholder engagement*

- | | |
|---|---|
| 1. Cakupan aktor pemangku kepentingan/pihak terkait (pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil) | 3 |
| 2. Cakupan wilayah pemangku kepentingan yang dijangkau (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, internasional) | 3 |
| 3. Cakupan tema yang dipetakan dalam stakeholder engagement (lingkungan, sosial, ekonomi) | 3 |
| 4. Pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan relasi dengan pemangku kepentingan (komunikasi, konsultasi, dialog, kemitraan) | 3 |
| 5. Program/kegiatan sebagai perwujudan stakeholder engagement | 3 |
| 6. Hasil dari <i>stakeholder engagement</i> | 3 |

Substansi pada tabel di atas merupakan kriteria penilaian PROPER untuk aspek pelibatan pemangku kepentingan. Rincian bobot dapat mengalami penyesuaian sesuai edaran pelaksanaan yang berlaku pada tahun penilaian, sehingga verifikasi terhadap dokumen resmi PROPER menjadi langkah penting sebelum penyusunan dokumen.

Kajian pelibatan pemangku kepentingan menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed method*) agar hasil kajian memiliki kekuatan angka sekaligus kedalaman cerita. Angka menggambarkan sebaran pandangan dan tingkat penerimaan, sedangkan penuturan langsung pemangku kepentingan menjelaskan sebab, konteks, serta harapan di balik angka tersebut. Pendekatan kajian mengacu pada rujukan yang tercantum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Nomor 7 Tahun 2025, dilengkapi dengan alat analisis spesifik pelibatan.

Pengumpulan data primer

- **Wawancara Semi-Terstruktur**

Menggali pandangan mendalam dari tokoh masyarakat, aparat desa, pelaku usaha lokal, aparat pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan utama lainnya.

- **Diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion* atau FGD)**

Mempertemukan berbagai sudut pandang dalam satu forum untuk menguji kesepakatan, mengidentifikasi perbedaan pandangan, dan merumuskan isu prioritas bersama.

- **Survei kuesioner**

Mengukur tingkat kepercayaan, penerimaan, dan kepuasan pemangku kepentingan terhadap kehadiran perusahaan secara terstruktur dan dapat dihitung.

Pengumpulan data sekunder

- **Telaah dokumen**

Menelaah rekam jejak dialog sebelumnya, catatan keluhan, laporan program sosial, serta dokumen lingkungan perusahaan.

- **Studi literatur dan kajian pustaka**

Menempatkan temuan lapangan dalam kerangka praktik terbaik pelibatan pemangku kepentingan di sektor sejenis.



Analisis data

- **Studi Literatur dan Kajian Pustaka**
Menempatkan temuan lapangan dalam kerangka praktik terbaik pelibatan pemangku kepentingan di sektor sejenis.
- **Statistik Deskriptif**
Menyajikan sebaran, rata-rata, dan proporsi hasil survei persepsi untuk memperlihatkan kecenderungan pandangan pemangku kepentingan.
- **Analisis Deret Waktu (*Time Series*)**
Membaca perubahan tingkat penerimaan masyarakat selama beberapa periode untuk memperkirakan arah dinamika hubungan.
- **Matriks Pengaruh-Kepentingan (*Power-Interest Matrix*)**
Menempatkan setiap aktor pada kuadran berdasarkan tingkat pengaruh dan tingkat kepentingannya sebagai dasar penyusunan strategi pelibatan pemangku kepentingan.
- **Pengukuran *Social License to Operate Index (SLI)***
Mengukur posisi izin sosial perusahaan pada 4 tingkatan penerimaan, mulai dari penolakan hingga identifikasi psikologis.

Pengukuran Izin Sosial dan Prinsip Kerja Lapangan

Analisis *Social License to Operate Index (SLI)* memetakan posisi perusahaan pada 4 tingkatan penerimaan masyarakat. Semakin tinggi tingkatnya, semakin kokoh legitimasi sosial yang dimiliki perusahaan dan semakin rendah risiko konflik jangka panjangnya. Hasil pengukuran ini menjadi dasar penyusunan strategi pelibatan pemangku kepentingan pada periode berikutnya.



Penolakan
Withdrawal



Penerimaan
Acceptance



Persetujuan
Approval



Identifikasi Psikologis
Psychological Identification

Membaca Tingkatan SLI

Tingkat penolakan menandakan bahwa masyarakat menolak kehadiran perusahaan. Tingkat penerimaan menandakan bahwa masyarakat membiarkan kegiatan operasional berjalan tanpa dukungan aktif. Tingkat persetujuan menandakan bahwa masyarakat mendukung kehadiran perusahaan. Tingkat identifikasi psikologis menandakan bahwa masyarakat merasa memiliki keterikatan dan menempatkan perusahaan sebagai bagian dari pembangunan wilayahnya.

Prinsip Kerja Lapangan

Inklusif

Perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan mendapat ruang penggalan tersendiri agar suaranya tidak tertutup oleh kelompok dominan.

Terverifikasi silang

Setiap temuan penting diuji melalui sekurang-kurangnya 2 sumber berbeda sebelum masuk ke dalam laporan.

Menghormati etika penelitian

Persetujuan responden diminta sebelum wawancara dan identitas pribadi dijaga kerahasiaannya dalam pelaporan.

Terdokumentasi rapi

Seluruh dialog memiliki catatan waktu, peserta, pokok pembahasan, kesepakatan, dan tindak lanjut yang dapat ditelusuri.

Layanan pendampingan pelibatan pemangku kepentingan dijalankan sebagai satu rangkaian utuh yang berakhir pada 1 *output*, yaitu Laporan Pelibatan Pemangku Kepentingan. Kelima lingkup di bawah ini saling menopang dan dijalankan bersama karena mutu rekomendasi akhir bergantung pada kelengkapan seluruh tahapannya.

- 1 Identifikasi dan Pemetaan Pemangku Kepentingan
- 2 Analisis Relasi Antar Pemangku Kepentingan
- 3 Penilaian Tingkat Keterlibatan Berdasarkan AA1000SES
- 4 Pengukuran *Social License to Operate Index* (SLI)
- 5 Perumusan Strategi dan Rekomendasi Pembinaan Hubungan

Output Kajian

Seluruh rangkaian pekerjaan bermuara pada 1 dokumen utama, yaitu Laporan Pelibatan Pemangku Kepentingan. Dokumen tersebut memuat 4 produk analisis berikut, dilengkapi dengan lampiran data mentah, instrumen yang digunakan, dan dokumentasi kegiatan lapangan.

01 Peta Pemangku Kepentingan

Pemetaan aktor kunci pada matriks pengaruh-kepentingan, disertai gambaran jaringan relasi antar pihak dan penandaan tokoh penggerak yang berpotensi menjadi mitra dialog.

02 Potret Tingkat Keterlibatan

Penempatan setiap kelompok pemangku kepentingan pada tingkatan AA1000SES dilengkapi dengan analisis kesenjangan antara kondisi saat ini dan tingkat pelibatan yang hendak dicapai.

03 Analisis *Social License to Operate Index* (SLI)

Hasil pengukuran posisi izin sosial perusahaan berdasarkan pandangan responden, disertai analisis faktor pendukung dan kendala penerimaan masyarakat.

04 Rekomendasi Pembinaan Hubungan

Usulan strategi pelibatan yang disesuaikan untuk setiap kelompok pemangku kepentingan, dilengkapi indikator keberhasilan, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme umpan balik.

Ketidakhadiran mekanisme pelibatan yang terstruktur menempatkan perusahaan pada posisi rawan. Sebaliknya, kajian pelibatan pemangku kepentingan yang dijalankan secara konsisten memperkuat posisi perusahaan pada berbagai lini, mulai dari operasional harian hingga penilaian kinerja tahunan.



Resiko Mengabaikan Kajian Pelibatan Pemangku Kepentingan

- Program Meleset dari Kebutuhan**
 Bantuan diberikan kepada kelompok yang salah atau dalam bentuk yang tidak dibutuhkan. Anggaran terserap penuh, sementara persoalan mendasar di masyarakat tetap bertahan dari tahun ke tahun.
- Ketegangan dan Konflik Sosial**
 Distribusi manfaat yang tidak merata memicu kecemburuan antar kelompok. Ketegangan yang dibiarkan dapat berkembang menjadi penolakan terbuka terhadap kegiatan operasional perusahaan.
- Ketergantungan Masyarakat**
 Program yang bersifat pemberian berulang tanpa penguatan kapasitas menciptakan ketergantungan jangka panjang, sehingga masyarakat sulit mandiri saat perusahaan mengakhiri masa operasinya.
- Nilai PROPER Tertahan**
 Program pemberdayaan tanpa data dasar sulit dibuktikan dampaknya pada saat verifikasi. Peringkat PROPER perusahaan berhenti pada tingkat ketaatan dan gagal naik ke peringkat yang lebih tinggi.



Manfaat Kajian Pelibatan Pemangku Kepentingan

- Program Meleset dari Kebutuhan**
 Dialog terjadwal dengan tokoh masyarakat, aparat desa, dan kelompok terdampak memastikan aspirasi aktor kunci masuk ke dalam rancangan program perusahaan.
- Efisiensi anggaran sosial**
 Dana diarahkan pada prioritas yang jelas, mengurangi pemborosan pada kegiatan seremonial yang berdampak rendah.
- Hubungan jangka panjang yang sehat**
 Masyarakat yang merasa dipahami cenderung menempatkan perusahaan sebagai mitra pembangunan wilayahnya.
- Bahan pelaporan yang kuat**
 Rekam jejak dialog terdokumentasi langsung dapat digunakan untuk pengungkapan *Global Reporting Initiative* (GRI) 2-29 tentang pendekatan pelibatan pemangku kepentingan.
- Fondasi Pelibatan untuk Analisis SROI**
 Kriteria SROI dalam PROPER menempatkan identifikasi kondisi awal sebagai butir penilaian pertama. Data dasar dari pemetaan sosial mengisi kebutuhan tersebut, sehingga pengukuran dampak pada tahap berikutnya memiliki pembanding yang sah.
- Kesiapan menghadapi verifikasi**
 Laporan Pelibatan Pemangku Kepentingan menjadi bukti langsung pemenuhan butir penilaian ke-7 pada aspek Pemberdayaan Masyarakat dalam PROPER, mencakup cakupan aktor, wilayah, tema, pendekatan relasi, program perwujudan, hingga hasil dialog.

Mengapa Memilih Enthalphy?



Terintegrasi dengan Layanan Keberlanjutan Lainnya

Kajian pelibatan pemangku kepentingan disusun dengan memperhatikan kaitannya terhadap dokumen dan penilaian yang sedang dijalani mitra.

Menyesuaikan ragam kebutuhan keberlanjutan dan kepatuhan lingkungan, mulai dari perizinan lingkungan, pendampingan PROPER, hingga pelaporan keberlanjutan.



Berlanjut ke Pengukuran Dampak

Data dasar yang kami siapkan dirancang sejak awal agar dapat dipakai kembali dalam kajian *Social Return on Investment* (SROI) beberapa tahun kemudian, sehingga perusahaan memiliki tolok ukur perubahan yang akurat.



Rujukan Standar yang Terbaru

Pendampingan kajian mengacu pada AA1000SES sebagai panduan operasional utama, dilengkapi dengan pendekatan *Social License to Operate Index* (SLI) untuk pengukuran kuantitatif. Rujukan tersebut memberikan tolok ukur yang diakui secara internasional bagi mitra kami.



Dokumentasi Rapi dan Dapat Ditinjau

Setiap angka dalam laporan dapat ditelusuri hingga instrumen, responden, dan waktu pengambilannya. Kejelasan ini menjadi bekal kuat pada saat verifikasi lapangan maupun audit pihak ketiga.

Scan Here



Membangun kemitraan terpercaya melalui dialog yang tertata!
Konsultasikan Kebutuhan Kajian Pelibatan Pemangku Kepentingan Anda Sekarang!

✉ contact@enthalphy.com 🌐 www.enthalphy.com ☎ (+62) 821-6174-1128

Konsultasi Gratis (60 Menit)

Kami menyediakan sesi konsultasi selama 60 menit untuk membahas kondisi pelibatan pemangku kepentingan yang sudah berjalan, dan kesiapan dokumen yang dimiliki perusahaan. Dari sesi ini, mitra memperoleh gambaran isi Laporan Pelibatan Pemangku Kepentingan yang akan disusun, mulai dari peta pemangku kepentingan, potret tingkat keterlibatan, pengukuran izin sosial, hingga rekomendasi pembinaan hubungan, tanpa kewajiban melanjutkan ke tahap berikutnya.

Progres Tercatat Berkala dan Transparan

Pantau setiap tahap kajian dan penyusunan laporan secara *real-time* melalui *working sheet* yang selalu diperbarui. Mitra dapat memberikan masukan pada setiap tahapan tanpa menunggu draf akhir tersaji.

Pendampingan Langsung ke Masyarakat

Hadir secara langsung ke wilayah operasional untuk menggali data dari warga, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah desa. Berkoordinasi secara resmi dengan pemerintah setempat dan mendampingi mitra dalam proses persetujuan sebelum wawancara demi menjaga proses tetap etis sekaligus menghasilkan temuan yang benar-benar mewakili kondisi lapangan.





***Take the next step towards
sustainable growth***



PT Enthalphy Environergy Consulting

🌐 www.enthalphy.com

📍 Jl. Tegal Mlati, Gg. Kapas 2 No. 101D, RT 01/RW 35 Jongkang,
Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, DI Yogyakarta 55581

☎ +62 821 6174 1128

✉ contact@enthalphy.com



